

SERUAN PARA PEMIMPIN AGAMA DI PAPUA

Kami, para pemimpin agama di Papua, mengikuti dengan cermat dan penuh perhatian perkembangan situasi masyarakat di Papua khususnya dinamika sosial dan politik masyarakat selama bulan-bulan terakhir. Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, kami merasa dan mengalami sendiri bahwa masyarakat Papua tak henti-hentinya dikuras tenaganya oleh dinamika sosial politik terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Konflik pemekaran akibat Inpres 1/2003, rangkaian perjuangan yuridis dan politis di Mahkamah Konstitusi, rangkaian pemilihan umum dan pemilihan presiden, pemekaran kabupaten/ kota serta pemilihan kepala daerah (PILKADA), pembentukan Majelis Rakyat Papua, dan ketidakjelasan penyelesaian keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat—semuanya adalah fakta-fakta dimana tenaga, pikiran, waktu, biaya dan terutama hati kita terserap.

Kali ini kembali kita semua diserap oleh fakta-fakta yang berkembang di hadapan mata kita khususnya:

Pertama, berbagai isu dan berita menyesatkan yang berkembang seputar tanggal 15 Agustus 2005. Kami temukan isu dan kabar yang membuat kita sendiri resah, cemas, bingung dan terombang-ambing. Ada isu yang mengatakan, “Kita orang Papua mau merdeka sehingga kamu pendatang pulang”. Ada isu yang mengatakan “PBB akan memberikan kemerdekaan Papua bersama Belanda dan Amerika Serikat”.

Kedua, kami temukan upaya-upaya memecah belah masyarakat dengan mengeksploitasi perbedaan keyakinan agama, warna kulit, suku, status sosial dan keyakinan politis. Cara-cara ini adalah warisan Orde Baru yang telah menanamkan keyakinan kuat bahwa perbedaan dan kemajemukan adalah berbahaya untuk kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara. Secara khusus, kami temukan upaya untuk mendirikan Forum Komunikasi Masyarakat Perantau yang menggelisahkan banyak pihak yang berkehendak membangun kerukunan, damai dan keadilan di Tanah Papua ini.

Ketiga, kami mengalami sendiri bahwa UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah mengalami erosi makna yang amat mendalam sehingga mengakibatkan kekecewaan mendalam bahkan kemarahan yang

bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.

Keempat, rencana Dewan Adat Papua untuk mengembalikan Otonomi Khusus kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 15 Agustus 2005 yang telah menarik perhatian berbagai unsur masyarakat Papua sekaligus menarik arus pergerakan massa ke Jayapura.

Sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan tradisi-tradisi kerohanian besar dalam sejarah umat manusia, kami telah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat di Papua pada tahun 2002 untuk menjadikan PAPUA TANAH DAMAI. Berpegang pada kesepakatan tersebut kami menanggapi fakta-fakta di atas dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menilai bahwa isu-isu yang menjanjikan hal-hal muluk dalam waktu satu dua hari adalah janji-janji kosong belaka dan tidak memiliki nilai kebenaran.
2. Kami menolak dengan tegas upaya pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Perantau karena kami menilai bahwa hal tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah masyarakat Papua dengan mengeksplotasi perbedaan suku dan agama dan mengadu domba warga masyarakat sehingga justru mau menjadikan Papua bukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
3. Kami menilai bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah tidak serius dalam melindungi jatidiri dan hak hidup masyarakat asli Papua yang menjadi inti filsafat dari UU No. 21/2001 sehingga seluruh pembicaraan hanya terpusat pada pengucuran dan pencairan dana.
4. Kami menilai bahwa sikap Dewan Adat Papua untuk mengembalikan Otsus adalah bagian dari ungkapan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Amandemen Kedua pasal 28E ayat 3 sekaligus perlu memikirkan kepentingan masyarakat Papua secara menyeluruh.
5. Kami menilai bahwa pergerakan massa dan konsentrasi massa ke Jayapura akibat dari sikap Dewan Adat Papua tersebut berisiko tinggi terhadap upaya-upaya dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Papua sebagai TANAH DAMAI.

Mengingat hal-hal di atas kami merasa prihatin sekaligus tetap berusaha menegakkan tekad kami PAPUA TANAH DAMAI dengan menyerukan hal-hal berikut:

1. Masyarakat perlu memakai hati nurani dan akal sehat untuk menilai isu dan kabar burung yang tersebar di antara kita. Kita telah puluhan tahun mengalami suasana semacam ini dan janganlah membiarkan diri dibodohi oleh isu dan berita yang tidak memiliki bukti ilmiah dan yuridis.
2. Kami mengingatkan kepada semua pihak agar menyadari kembali bahwa perbedaan ras, agama, suku, warna kulit, struktur tubuh datang dari TUHAN SANG MAHA PENCIPTA. Perbedaan itu adalah ANUGERAH ILAHI yang patut kita syukuri, jaga serta hormati bersama. Karena itu kami dengan tegas menolak segala upaya oleh pihak manapun yang menyalahgunakan ANUGERAH ILAHI untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
3. Kami menyerukan kepada Pemerintah Pusat untuk secara serius, segera dan sistematis mengambil langkah untuk melindungi jatidiri dan hak hidup masyarakat Papua sebagai sesama anak bangsa seperti antara lain sudah dituangkan dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus.
4. Kami menyerukan kepada Partai-partai Politik di Indonesia untuk tidak mengambil keuntungan dari dinamika sosial dan politik yang ada di Papua demi kepentingan mereka sendiri.
5. Kami menyerukan agar Pemerintah Daerah yang sekarang kebanyakan dijabat oleh orang Papua sendiri mawas diri atas apa yang telah dibuat selama ini bagi masyarakat Papua.
6. Menanggapi rencana aksi 15 Agustus 2005, kami menyerukan agar pelaksanaannya dijalankan dengan damai, santun, dan menghormati hak-hak asasi setiap manusia yang adalah CIPTAAN TUHAN.
7. Kepada Tentara Nasional Indonesia selaku alat pertahanan negara, kami menyerukan agar bertindak secara profesional, berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, dan hukum-hukum hak asasi manusia.
8. Kepada Kepolisian yang adalah alat keamanan masyarakat sipil, kami menyerukan agar menjamin keamanan seluruh warga masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, warna kulit, dan ideologi politik.
9. Kepada mass media cetak dan elektronik, kami meminta dengan hormat agar pemberitaan apapun dilakukan dengan mengindahkan asas ilmiah, akurat, etis dan menjaga keutuhan masyarakat Papua.

Demikian seruan kami para pemimpin agama di Papua. Semoga SANG CAHAYA ILAHI yang sama-sama kita imani memberikan jalan terang bagi kita.

Dikeluarkan di Jayapura
Tanggal 5 Agustus 2005

Pdt. Herman Saud
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua

Uskup Leo L. Ladjar OFM
Uskup Jayapura

H. Zubeir D. Hussein
Ketua MUI Wilayah Papua

Pandita Arya Bodhi Jasmani
Sekretaris Majelis
Budhayana Indonesia
Provinsi Papua

Drs. I. Nyoman Sudha
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
Provinsi Papua